KEMENTERIAN HUKUM

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK DAN KERJA SAMA

Nomor SOP	**SEK-OT.02.02-190**
Tanggal Pembuatan	**20 AGUSTUS 2025**
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	**3 NOVEMBER 2025**
Disahkan oleh	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
Nama SOP	**PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA LUAR NEGERI (MoU)**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994); 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139); 5 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tim Perizinan dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Bagi Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2020); 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253); 7 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui informasi terkini terkait kerja sama luar negeri; 3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan pihak terkait; 4. Cakap dan ramah; 5. Memiliki kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
Keterkaitan :	**Peralatan/perlengkapan :**
1 SOP Kunjungan kehormatan *(Courtesy Call)*; 2 SOP Surat Izin *Expert*. 3 SOP Keprotokolan	1 Komputer; 2 Akses internet kecepatan tinggi; 3 *Printer;* 4 ATK; 5 Mesin Fotokopi; 6 akun e-*mail* dinas atau setara/ *Whatsapp*, Sumaker; 7 Alat Komunikasi; 8 Kamera; 9 Alat Perekam; 10 *Hard Disk*.
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Apabila Penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama tidak dilaksanakan dengan baik maka program kerja Rencana Kerja Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama tidak akan terlaksana.	1 Laporan *Whatsapp*, Berita, Laporan akhir yang akan diserahkan kepada Menteri, Wamen, Sekjen, Pimti Madya Unit Eselon 1 terkait, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama; 2 Arsip Elektronik/cloud computing, maupun Manual.

STANDAR PELAYANAN *(STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE)*
PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA LUAR NEGERI (MoU)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu/Baku			Keterangan
		SEKRETARIS JENDERAL	KARO HUKERMA	KABAG	KETUA TIM	JFT/JFU	UNIT/INSTANSI TERKAIT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penawaran dari pihak asing untuk bekerja sama dengan Kementerian Hukum		MULAI					Instruksi	1 jam	Instruksi	
2	Kepala Biro menyampaikan disposisi ke Kabag Hukum & Kerma mengenai rencana kerja sama							Surat	1 jam	Surat	
3	Kabag Hukum & Kerma membahas bersama Ketua Tim (Katim) mengenai rencana pelaksanaan dan persiapan yang harus dilakukan kepada JF.							Surat	1 jam	Surat	
4	Pelaksana menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana kerja sama.							Surat	1 jam	Surat	
5	Mengundang Pejabat yang menangani kerja sama luar negeri untuk mendapatkan masukan mengenai rencana kerja sama.							Data	3 Jam	Data	
6	Katim mencatat dan merangkum masukan-masukan dari Unit Kerja Eselon I (UKE I) di lingkungan Kementerian Hukum							Data	3 jam	Data	
7	Mengundang Stakeholders/pemangke kepentingan terkait untuk membahas rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dengan negara asing.							Data	3 jam	Data	
8	Katim menyusun laporan hasil rapat kepada Kabag. Hukum & Kerma							Dokumen	2 jam	Dokumen	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu/Baku			Keterangan
		SEKRETARIS JENDERAL	KARO HUKERMA	KABAG	KETUA TIM	JFT/JFU	UNIT/INSTANSI TERKAIT	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Kabag Hukum & Kerma mengoreksi laporan dan memberikan paraf untuk disampaikan kepada Kepala Biro.							Dokumen	1 hari	Dokumen	
10	Kepala Biro mengoreksi laporan dan surat pengantar ke Sekretaris Jenderal sebagai laporan hasil keikutsertaan rapat.							Surat dan dokumen	2 jam	Surat dan Dokumen	
11	Pengiriman laporan hasil keikutsertaan dalam kegiatan ke Sekretaris Jenderal							Surat dan dokumen	1 Jam	Surat dan Dokumen	
12	Penandatanganan kerja sama antara Kementerian Hukum dengan mitra asing.					SELESAI		Surat	1 Jam	Surat	

